

---

**PERANAN PENGENALAN POLITIK TERHADAP TINGKAT KETERLIBATAN PEMILIH AWAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI, KABUPATEN MUSI RAWAS**

***THE IMPACT OF POLITICAL SOCIALIZATION ON INITIAL VOTER ENGAGEMENT IN THE 2020 ELECTIONS IN MEGANG SAKTI SUB-DISTRICT OF MUSI RAWAS DISTRICT***

---

Agus Tiansah <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan,  
Universitas Musi Rawas,  
Sumatera Selatan, Indonesia

\*email: atiansah2@gmail.com

**Abstrak**

Pendidikan politik merupakan salah satu tiang yang sangat penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sekaligus memiliki dampak terhadap tingkat partisipasi pemilih pada sebuah pemilihan, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan cara menganalisis data dan fakta yang diperoleh selama penelitian dilapangan dari 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula adalah tingkat informasi dan pemahaman tentang proses demokrasi atau pemilihan umum, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

**Kata Kunci:**

Sosialisasi  
Partisipasi  
Pemilih Pemula

**Keywords:**

Socialization  
Participation  
Beginner Voters

*Accepted:* Mei 2023

*Published:* Oktober 2023

**Abstract**

*The process of political upbringing is a crucial element in the successful implementation of a democratic system, as well as impacting the level of voter engagement in an election, specifically the regional head election in this instance. With this in mind, the researcher was driven to demonstrate the significance of political upbringing in enhancing the involvement of first-time voters in the 2020 regional head election in Musi Rawas Regency's Megang Sakti District. The researcher employed a descriptive qualitative research approach, outlining and interpreting data and facts gathered during field research from 30 sources to formulate a hypothesis. The study's outcomes demonstrate that political socialization has an impact on promoting political engagement among first-time voters in the 2020 regional election in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency. The factors contributing to the increased involvement of young voters include access to information and comprehension of the democratic process and general elections, particularly during the 2020 regional election.*

---

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang merupakan konsep modern yang diperkenalkan oleh Josep Scumpeter (2005). Menurutnya, pemilihan umum harus dilakukan secara berkala dan bebas agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi. Dalam pemilihan Bupati, sosialisasi politik menjadi

faktor kunci keberhasilan, karena dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan di suatu daerah dan tata cara pemilihan. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang memadai, pemilih dapat menganalisis dan memiliki sikap yang jelas terhadap calon yang akan dipilih.

Meskipun jumlah pemilihnya tidak sebanyak pada pemilihan Gubernur di tingkat provinsi, tetapi dengan

adanya 14 Kecamatan dan 189 Desa, pelaksanaan pemilihan Bupati di Kabupaten Musi Rawas tidaklah mudah, terutama bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang harus melakukan kampanye di 14 Kecamatan yang secara geografis memiliki daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, tanpa adanya sosialisasi yang meluas dari semua pihak, terutama partai politik dan penyelenggara pemilihan, sangat dimungkinkan bahwa tujuan visi misi dari para calon tidak akan dipahami oleh calon pemilih. Banyaknya pemilih yang tidak peduli terhadap dunia politik karena kurangnya kepercayaan terhadap para politisi yang telah mereka pilih sebelumnya dan kejenuhan terhadap para pemimpin, membuat daftar tugas yang panjang bagi partai politik dan penyelenggara untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Terlebih lagi, dengan banyaknya peserta calon bupati dan calon wakil bupati yang mengikuti pilkada, persaingan untuk memenangkan suara terbanyak semakin sengit. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin kesulitan dalam menentukan pilihannya, terutama bagi pemilih pemula yang termasuk dalam golongan remaja. Oleh karena itu, kandidat harus aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dengan cara memperkenalkan dan mensosialisasikan diri secara terus-menerus. Salah satu sarana sosialisasi yang dapat digunakan adalah iklan di media massa, mengingat kemampuan media dalam mempengaruhi khalayak. Diharapkan upaya komunikasi melalui iklan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemilih pemula, sehingga dapat mengurangi rasa ketidakpastian.

Pengaruh besar dari sosialisasi politik dapat dilihat pada proses pembentukan dan perubahan sikap serta peningkatan partisipasi calon pemilih, terutama ketika interaksi dengan masyarakat dilakukan secara langsung. Bagi masyarakat yang memilih sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu

tonggak penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, bebas berekspresi dan berkehendak, serta mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana demokrasi dijalankan di negara tersebut, indikatornya dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara terus-menerus dan bebas.

Setiap individu, tak peduli latar belakang seperti etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau golongan, memiliki hak yang sama untuk berkumpul dan bergabung, menyuarakan pendapat, serta mengevaluasi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini dikenal sebagai hak politik yang dapat diwujudkan secara langsung melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum memerlukan prosedur yang disebut sistem pemilihan. Sistem pemilihan meliputi dua hal. Pertama, prinsip-prinsip normatif yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilihan yang mengatur bagaimana pembagian kekuasaan di lembaga perwakilan sesuai dengan dukungan politik yang tercermin dari hasil perolehan suara dalam pemilihan umum. Kedua, proses pemilihan, yaitu mekanisme pemilihan yang meliputi manajemen pemilihan, pemilihan di tempat pemungutan suara, penghitungan suara, petugas pemilihan, penetapan hasil pemilihan, dan penentuan hasil pemilihan menjadi kursi di lembaga perwakilan atau pada tingkat eksekutif.

Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, terdapat dua pasang calon yang bertarung secara langsung untuk memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya meraih dukungan masyarakat dan memenangkan pilkada 2020 di Kabupaten Musi Rawas, kedua kandidat berlomba-lomba melakukan kampanye. Kecamatan Megang Sakti menjadi daerah yang strategis karena memiliki jumlah

daftar pemilih tetap terbesar di Kabupaten Musi Rawas dan menjadi penentu kemenangan dalam setiap pemilihan umum eksekutif. Dari empat belas kecamatan yang ada, Kecamatan Megang Sakti menjadi incaran keenam kandidat untuk memenangkan pemilih pemula yang ada di sana.

Jumlah warga Kecamatan Megang Sakti yang tercatat sebagai pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 mencapai sekitar 38600 orang, termasuk di dalamnya para pemula. Dengan DPT yang begitu besar dan menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan umum, para kandidat melakukan berbagai cara dan pendekatan untuk memenangkan simpati warga terutama pemula, meskipun dalam situasi pandemi yang belum mereda. Pendekatan yang dapat dilakukan hanya sebatas sosialisasi melalui media elektronik dengan menampilkan kampanye yang lebih menarik, sehingga warga pemula, yang dikenal sebagai kaum milenial, tertarik pada Pilkada 2020.

Secara umum, peran dapat dijelaskan menurut Bauer (2007:55) dalam Haris (2012:204) sebagai persepsi tentang tindakan yang diharapkan dari seseorang atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari individu tersebut. Oleh karena itu, peran dapat dianggap sebagai salah satu elemen dari sistem organisasi sosial, bersama dengan norma dan budaya organisasi.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu konsep yang melibatkan pembuatan produk sebagai alternatif dari perilaku atau tindakan. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan. Menurut sejarah, konsep peran adalah karakter yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung. Namun, dalam ilmu sosial, peran diartikan sebagai fungsi yang dilakukan

seseorang ketika menjabat suatu posisi. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa peran memiliki pengaruh sesuai dengan fungsinya.

Pendidikan politik adalah tindakan/aktivitas yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu agar mereka memahami sistem politik dan dapat memberikan respons politik terhadap fenomena politik yang terjadi. Gabriel A. Almond memberikan batasan pada pendidikan politik sebagai bagian dari proses pendidikan yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki dua aspek penting, yaitu proses dan tujuan. Prosesnya adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap politik. Sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi merujuk pada keterlibatan, keikutsertaan, atau peransertaan individu dalam suatu kegiatan. Menurut Budiardjo (1994:81), prinsip partisipasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahap program, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, dengan memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, pemikiran, atau materi. Milbarth, sebagaimana yang dikutip oleh Budiardjo (1994:89), mengkategorikan partisipasi menjadi beberapa jenis. Pertama, apatis, yakni mereka yang tidak berpartisipasi dan tidak tertarik pada proses politik. Kedua, penonton, yakni individu yang setidaknya pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, termasuk komunikator, spesialis tatap muka, aktivis partai dan kampanye, serta aktivis masyarakat.

Keterlibatan menjadi faktor kunci dalam perkembangan demokrasi. Prinsip dasar dari demokrasi adalah bahwa setiap individu memiliki

pengetahuan yang lebih baik tentang dirinya dan dunianya dibandingkan dengan orang lain, termasuk para ahli yang membuat keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik individu adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik. Kesadaran politik mencakup pemahaman akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, sedangkan pengetahuan tentang lingkungan sosial dan politik serta minat terhadap hal-hal tersebut juga memainkan peran penting. Kepercayaan pada pemerintah juga merupakan faktor yang signifikan, yang mencakup penilaian individu terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Sinaga (2003:118), pemilih adalah individu yang berasal dari Indonesia dan sudah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah/pernah menikah. Pada setiap pemilihan umum, petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum akan melakukan pendataan untuk mendaftarkan pemilih. Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali memilih karena mereka baru mencapai usia pemilih, yakni antara 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka tentang pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya. Namun, yang membedakan adalah antusiasme dan preferensi. Sesuai dengan Sekertaris Jendral KPU Biro Teknis dan Humas (2010).

Individu yang baru pertama kali memilih, terutama remaja yang berusia 17 tahun, memiliki budaya yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal dan mencari kesenangan. Oleh karena itu, mereka menghindari hal-hal yang dianggap kurang menyenangkan. Selain mencari kesenangan, memiliki kelompok sebaya sangat penting dalam kehidupan remaja, sehingga seorang remaja perlu memiliki teman sebaya dalam pergaulannya. Menurut Sekretariat Jenderal KPU Biro Keberhasilan dan Humas 2010, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memilih adalah sebagai berikut: Warga Negara

Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau ingatan, terdaftar sebagai pemilih, dan bukan anggota TNI atau Polri (Purnawirawan atau tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian).

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) ini adalah Pasal 18 Ayat (4) Amandemen Kedua (2002) UUD 45 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Supono (2005:106), terdapat minimal 4 (empat) alasan mengapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dijalankan secara langsung di daerah. Pertama, pelaksanaan pilkada langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak otonomi daerah yang harus dipertahankan. Ketiga, tujuannya adalah memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan proses demokrasi di tingkat lokal. Keempat, pilkada langsung juga berfungsi untuk memberdayakan daerah dalam memperkuat struktur pemerintahan dalam bangunan piramida, di mana pemerintahan nasional didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang kuat.

Sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah mencapai hasil yang optimal. Komunitas dan

masyarakat telah terlibat aktif dalam tahap sosialisasi politik, di mana panitia pilkada telah mengambil langkah optimal seperti menggunakan jejaring media sosial dan memberikan edukasi yang lengkap kepada pemilih pemula dan masyarakat. Selain itu, panitia juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahap mekanisme sosialisasi politik, panitia kecamatan telah melakukan upaya optimal dengan menjaring pemilih baru di setiap desa (Herman, S., Malik, I., & Sari, R. 2021).

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah intensif melakukan edukasi tentang pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan spanduk serta iklan di surat kabar dan papan jalan. Target edukasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Padang adalah pemilih pemula di Kota Padang, yang mencakup kegiatan di sekolah menengah atas dan kampus di sekitarnya untuk menyebarkan informasi terkait pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum berharap partisipasi meningkat hingga 70%, namun pada kenyataannya, persentase partisipasi pada pilkada Kota Padang tahun 2018 tidak mencapai target tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Padang, khususnya pemilih pemula, agar mereka menggunakan hak suara mereka dalam kegiatan demokrasi yang baik di Kota Padang (Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. 2019). Fungsi utama KPU ialah meningkatkan kesadaran politik rakyat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam segala proses pemilihan umum. Oleh karena itu, lembaga ini memerlukan sebuah upaya sistematis untuk mengembangkan cara komunikasi yang tepat dengan masyarakat, sehingga kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan dan proses demokratisasi di Indonesia dapat tercipta (Putri, M. P. 2016). Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan alat legitimasi

kekuasaan. Ini berarti bahwa pemilu adalah inti dari demokrasi dan merupakan cara untuk memberikan mandat kedaulatan rakyat (Kurniawan, R. C. 2013).

Dengan mempertimbangkan rendahnya dampak Status Sosial Ekonomi, diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan Status Sosial Ekonomi penduduk, sehingga dapat memengaruhi Partisipasi Politik yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah yang sama. Terdapat pengaruh besar dari Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik pada Pilwali 2015 Kota Samarinda di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang memengaruhi Partisipasi Politik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang serupa namun dengan variabel yang berbeda untuk menemukan strategi dan cara lain untuk meningkatkan Partisipasi Politik di wilayah yang sama, seperti kesadaran politik, money politics, dan lain-lain (Syarif, M. A. 2016).

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi politik untuk pemilih pemula adalah bagian dari pelaksanaan tugas sosialisasi politik sesuai dengan UU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan agen sosialisasi politik, KPU Kota Pontianak memberikan pendidikan politik kepada pemilih, meningkatkan proses sosialisasi, melakukan survei atau penelitian pendapat, serta meningkatkan kinerja pemilu. Faktor-faktor seperti mekanisme sosialisasi politik, pola sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi, dan sistem politik mempengaruhi KPU dalam melaksanakan tugas sosialisasi politik (Sari, P.D.S., Rube'i, M.A., & Firmansyah, S. 2022). Menurut Novianty, F. dan Octavia, E. (2018), pandangan lain mengenai hal ini mencakup (1) gambaran partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (2) program KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (3) hambatan

yang dihadapi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; dan (4) usaha KPU dalam mengatasi kendala untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam media sosial berdampak pada partisipasi politik pemilih pemula, terutama pada media sosial elektronik, cetak, dan daring. Namun, media sosial konvensional tidak begitu berpengaruh pada pemilih pemula yang lebih tertarik pada politik yang santai. Meskipun ada pengaruh dari media sosial yang berasal dari sekolah dan keluarga, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan karena pemilih pemula sudah terbiasa dengan penggunaan media. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media sosial memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 (Andriyendi, D.O., Nurman, S., & Dewi, S.F. 2023).

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa partisipasi politik merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Pemilu. Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum adalah bentuk kontribusi masyarakat dalam demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, ada kategori pemilih yang menarik untuk diperhatikan, yaitu pemilih baru. Pemilih baru adalah mereka yang untuk pertama kalinya memberikan suaranya dalam pemilu (Nur & Sukma, 2018). Menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pasal 1 ayat 28, warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah atau pernah menikah, dianggap sebagai pemilih. Kategori pemilih baru adalah warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun pada saat pemilihan dan memiliki hak suara

untuk memilih sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu (Nur & Sukma, 2018). Lebih detail dijelaskan oleh (Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. 2019) bahwa partisipasi politik dari pemilih pemula di Kelurahan Sumber tergolong tinggi, karena mereka sangat antusias dalam menggunakan hak suara mereka. Selain itu, partisipasi politik dari pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman dalam berorganisasi, dan modernisasi. Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, lobbying, kegiatan organisasi, kontak, dan tindakan kekerasan juga memengaruhi partisipasi politik dari pemilih pemula di Kelurahan Sumber.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu sistem untuk menentukan pemimpin, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam mencapai kesuksesan Pemilu. KPU kota Bandar Lampung memiliki visi, misi, dan tujuan serta berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang Pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada saat Pemilu, terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara yang patuh terhadap aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan bangsa dan Negara selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya (Baihaki, A. H. 2021). Menurut (Wibowo, M. T., & Hasan, E. H. E. 2017), situasi serupa terjadi di Kecamatan Lueng Bata di mana keluarga berperan sebagai agen sosialisasi politik yang mampu memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula yang kurang memahami politik. Kurangnya pemahaman politik pada pemilih pemula

dan kurangnya upaya sosialisasi politik oleh keluarga dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi politik dan meningkatnya angka golput. Hal ini menjadi sangat disayangkan karena pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, fungsi keluarga sebagai kelompok pertama yang memberikan pendidikan politik harus ditingkatkan untuk mensosialisasikan politik kepada pemilih pemula.

Keterlibatan politik memegang peran utama dalam proses pemilihan umum, termasuk pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Pada tahun 2015, Kota Semarang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih walikota. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik adalah pemilih pemula. Keengganan atau kurangnya pemahaman politik pada pemilih pemula dapat menurunkan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang pada tahun 2015 dan pemilihan presiden pada tahun 2019, perlu dilakukan penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, mengetahui peran partai politik, KPU, dan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta memahami kesiapan pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota Semarang di Kota Semarang. (Lestari, E. Y., & Arumsari, N. 2018).

Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling ideal di Indonesia karena memberikan penghargaan tertinggi pada masyarakat dan memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam membuat kebijakan publik, menyatakan pandangan mereka, dan membentuk

organisasi yang baik tanpa merugikan mereka. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah bentuk dan metode demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah adalah cara untuk menunjukkan kedaulatan dan membuktikan bahwa pemilih adalah penduduk daerah. Masalah yang sering terjadi dalam pemilihan pasca-konflik adalah partisipasi pemilih yang rendah. Sosialisasi politik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosialisasi politik oleh KPU Kota Semarang terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilukada Serentak 2020 (Andhito, R.D. 2022).

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia memperlihatkan praktek demokrasi yang konkret dan menjadi alat bagi warga untuk menunjukkan kedaulatan mereka atas negara dan pemerintah. Pemilu didasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum diadakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah petunjuk implementasi dari pelaksanaan kekuasaan negara yang sah oleh warga (kedaulatan rakyat), yang tercermin dalam keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (Pemilu). Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi dan ekspresi kedaulatan rakyat untuk memilih perwakilan dan pemimpin yang inspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Kelompok pemilih yang menarik untuk diamati dan diteliti lebih lanjut adalah pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali memberikan suara dalam Pemilu (Wardhani, P.S.N. 2018).

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti data yang dikumpulkan

tidak berupa angka-angka tetapi diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta seputar peran sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Responden dalam riset ini merupakan individu pemilih pemula yang memenuhi kriteria usia 17-21 tahun, diwakili oleh beberapa partai politik, serta diwakili oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat KPU hingga BAWASLU di tingkat Desa. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dengan tepat peran sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari proses pengorganisasian dan pengurutan data yang diperoleh dari lapangan dan informan menjadi pola, kategori, dan uraian dasar. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, seperti yang disebutkan oleh Moleong (2005:89), yaitu: Reduksi Data, yang merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat diperoleh. Sebagai contoh, laporan

lapangan dapat disingkat dan disusun secara lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

Data yang dikurangi memberikan gambaran yang lebih tepat tentang hasil pengamatan, juga memudahkan peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan, Penyajian Data adalah pengaturan informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambar, diagram, dan tabel mungkin akan bermanfaat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan informasi secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk yang lengkap, Kesimpulan adalah hasil akhir dari pengurangan dan penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 di kecamatan megang sakti kabupaten musu rawas.

### I. Pelaku Sosialisasi

Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik pada pemilihan eksekutif maupun legislatif di semua tingkat, sosialisasi menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pemilu dan estafet kepemimpinan. Pelaksanaan sosialisasi politik bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pemilihan umum kepada masyarakat. Kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat tentang pemilihan umum, karena tingkat pemahaman akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang staf KPU yang mengatakan bahwa:

*“Dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk Pilkada tahun 2020 yang lalu, segala pihak yang*



*terlibat seharusnya mengadakan kampanye politik terlebih dahulu sebelum masyarakat melakukan pemungutan suara. Selain mengadakan kampanye kepada masyarakat, KPU juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, terutama partai politik, harus menyebarkan informasi dan pengetahuan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami telah melakukan kampanye dengan berbagai cara, terutama untuk pemilih pemula, khususnya para generasi muda. Oleh karena itu, kami lebih banyak menggunakan media sosial yang biasa digunakan oleh kaum muda.”*

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa sosialisasi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan proses demokrasi. Kurangnya pemahaman tentang politik, terutama bagi pemilih yang baru pertama kali, jelas berdampak pada partisipasi politik dalam setiap pemilihan umum. Tingkat partisipasi yang tinggi dari pemilih yang baru pertama kali akan sejalan dengan tingkat pemahaman dan minat mereka terhadap dunia politik.

## 2. Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Informasi

Pendidikan politik yang dilakukan oleh semua pihak terlibat dalam pemilihan kepala daerah berdampak besar terhadap pemahaman politik masyarakat, termasuk pemilih pemula. Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Musi Rawas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya melakukan sosialisasi yang luas selain para calon dan partai politik. Hal ini diperkuat dengan hasil pengamatan dan wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat telah melihat iklan dan pengumuman langsung tentang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, termasuk semua calon yang bersaing. Meskipun hanya melihat iklan sebentar karena biasanya para calon memasang spanduk di tepi jalan. Seperti yang diungkapkan oleh Andri, seorang pemilih pemula berusia 18 tahun dari Desa Megang Sakti II, Kecamatan Megang Sakti.

*“Saya sempat menyaksikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan tahun 2020 di Spanduk-spanduk di pinggir jalan, namun hanya sekali lewat yang pada intinya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Rawas.”*

Pendapat ini didukung pula oleh Nia Kurniasih, seorang pemilih pemula berusia 19 tahun, yang mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang

*“pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari tim sukses anggota partai politik yang mendukung para calon Bupati dan Wakil Bupati melalui sebaran kertas yang menampilkan gambar dan Visi Misi para calon.”*

Dari hasil interviu tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi politik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik oleh partai politik, KPU, maupun para calon masih belum optimal karena masyarakat, terutama pemilih pemula, hanya melihat secara sekilas tentang para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa memahami secara mendalam mengenai rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh para kandidat jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

## B. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Pada aktivitas politik yang mereka lakukan dan berdasarkan hasil wawancara, para pemilih pemula menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pemilukada dengan cara:

### I. Memilih atau memberikan suara

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemilihan serta semakin meluasnya arti demokrasi di kalangan masyarakat berpengaruh besar terhadap dinamika politik bangsa. Salah satu indikator keberhasilan politik demokrasi adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Untuk menilai hal tersebut, diperlukan pengamatan terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam kehidupan sosial kita, tidak dapat dihindari adanya perbedaan-perbedaan. Begitu juga dalam dunia politik, setiap individu memiliki sudut pandang dan pemahaman yang berbeda dalam menghadapi masalah.

Dalam Pilkada 2020, terjadi peningkatan yang signifikan pada pemilih pemula di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya disebabkan oleh kesadaran individu, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman dan keluarga di sekitar mereka. Hal ini terlihat dari hasil

pengamatan dan wawancara yang menunjukkan bahwa:

*“Sangat antusias dan senangnya kami dalam pilkada Tahun 2020 karena teman-teman mengajak kami untuk mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ini adalah pengalaman pertama kami dalam ikut pencoblosan pemilu dan sangat penasaran dengan kesempatan pertama kami untuk memilih.”*

Rasa ingin tahu yang besar dan penasaran yang semakin bertambah karena pemberitaan di setiap iklan atau spanduk yang terpasang, membuat pemilih pemula ingin menyalurkan hak suaranya dengan benar. Hal ini menjadi salah satu dorongan yang membuat pemilih pemula yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap bersemangat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

2. Kampanye atau lebih pada sebatas mengajak Kegiatan kampanye dalam pemilihan umum merupakan acara penting yang diadakan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat pada hari pemungutan suara. Kampanye menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pemilihan umum, di mana para calon bupati Kabupaten Musi Rawas menggunakan berbagai cara, seperti pertunjukan musik dan pemberian bantuan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Di kecamatan Megang Sakti, para pemilih pemula yang mayoritas merupakan anak muda sangat antusias mengikuti proses kampanye meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial. Candra, seorang pemilih pemula berusia 19 tahun, menyatakan bahwa ia dan teman-temannya sangat tertarik mengikuti kampanye dan memperoleh informasi tentang para calon bupati.

*“Seringkali saya turut serta dalam kampanye dan mendengarkan pidato dari para kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah itu, saya mempengaruhi teman-teman saya untuk memilih calon yang saya dukung.”*

Kampanye adalah salah satu bentuk partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Tempe Kabupaten Musi Rawas. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara di atas, alasan mengapa pemilih pemula terlibat dalam kampanye bervariasi, selain untuk mendukung kampanye, mereka juga dapat berkumpul dengan teman-teman mereka.

## KESIMPULAN

Peran partisipasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai penyedia informasi. Para pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula karena mereka berada pada posisi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pilkada 2020 di Kabupaten Musi Rawas. Sosialisasi juga membantu masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk belajar cara berpartisipasi dengan benar dalam pilkada. Selain itu, sosialisasi dapat memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat dan pemilih pemula tentang pemilihan umum sehingga meningkatkan kesadaran mereka tentang peran sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh ahli peneliti dalam upaya sosialisasi politik bagi partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas adalah meningkatkan peran dari seluruh pihak yang terkait, termasuk KPU, kandidat, keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan tokoh masyarakat, melalui pendidikan politik yang diberikan secara dini kepada pemilih pemula. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam partisipasi politik. Pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik, seperti pemilu, serta memberikan pendidikan politik khusus bagi para pemilih pemula untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam kegiatan politik.

## REFERENSI

- Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). Peran jejaring sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Politik*, 3(1), 101-111.
- Andhito, R. D. (2022). Dampak Sosialisasi Politik Oleh KPU Kota Semarang Terhadap Partisipasi Pemilih Awal Pada Pilkada Serentak 2020 (Disertasi Doktor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Arifin, 2010. Fungsi media Massa dalam ranah sosial dan politik. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Baihaki, A. H. (2021). Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyash (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
- Budiardjo, Miriam, 1994. Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, 2009. Transparansi Media Massa. Jakarta: Prenada Media.
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Awal di Kabupaten Pontianak Barat. *Cakrawala Sosial: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293-303.
- Haris, 2012. Peran dan Tugas Media Massa dan Komunikasi. Bandung: PT. pustaka sinar harapan.
- Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Awal Dalam Pilkada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1371-1383.
- Ida, Rachmah, 2012. Komunikasi Politik, Media, dan Kehidupan Demokrasi. Grup Media Pranada. Jakarta.
- Kurniawan, R.C. (Januari 2013). Orientasi Politik Pemilih Baru pada Pilkada Pringsewu Tahun 2011 (Studi Pada Siswa SMA di Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Lestari, E.Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pertama dalam Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Moleong, L.J. (1991). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nur, W. dan P.S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pertama dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Putri, M.P. (2016). Peran KPU dalam Sosialisasi Pilpres Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres 2014 di Kalbar. *Ilmu Komunikasi e-Journal*, 30-34.
- Prasetyo, W.D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pertama pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial (CESSJ)*, 1(1).
- Sari, P.D.S., Rube'i, M.A., & Firmansyah, s. (2022). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pertama Kali di Kota Pontianak. *Karakter Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 39-50.
- Sekretariat Biro Teknis dan Humas KPU, 2010. Modul Pemilih Pemula, Jakarta: KPU Vol 1 No. 260.
- S.H Surandajang. 2013. Pilkada Langsung. Firman Penerbit. Jakarta.
- Sinaga, Kasturios 2003. Pemilihan Walikota dan Bupati Secara Langsung. Yogyakarta. Pustaka.
- Supono, Sapto 2005, Penyimpangan Pilkada. Bandung. PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Suyanto Bagong 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Orbit Sakti.
- Syarif, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Tahun 2015 Di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *e-Jurnal Tata Kelola Integratif*, 4(4).
- Wahyudi, M.I., & Adnan, M.F. (2019). Dampak Pengenalan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Baru Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 157-163.

Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pertama dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Warsito, 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wibowo, M.T., & Hasan, E.H.E. (2017). Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Baru di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Lueng Bata B. Aceh); Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata B. Aceh). *Jurnal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 536-551.